

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH DI JAWA BARAT

2.1 Pengantar

Di dalam bab ini dideskripsikan perihal pembinaan dan pengembangan bahasa daerah di Jawa Barat. Ada dua hal utama yang dikemukakan dalam bab ini, yakni (1) bahasa daerah, (2) sastra daerah, dan (3) pembelajaran bahasa dan sastra daerah.

2.2 Pembelajaran Bahasa Daerah

2.2.1 Batasan, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Daerah

Di Jawa Barat tumbuh dan berkembang beberapa bahasa daerah beserta dialeknya. Di dalam Perda No. 5/2003, Bab I, Pasal 1 (7), disebutkan bahwa bahasa daerah adalah bahasa Sunda, Cirebon, dan Melayu-Betawi yang tumbuh dan berkembang di wilayah Jawa Barat. Bahasa Sunda termasuk bahasa daerah di Jawa Barat, yang merupakan bahasa daerah terbesar kedua di Indonesia setelah bahasa Jawa. Wilayah pemakainya hampir seluruh Jawa Barat, kecuali wilayah Cirebon yang menggunakan bahasa Cirebon, sebagian Bogor, Depok, dan Bekasi, yang menggunakan Bahasa Melayu-Betawi.

Pada mulanya, bahasa Sunda berkedudukan sebagai *bahasa pribumi*. Hal ini sesuai dengan Lembaran Negara (*staatsblad*) No. 125 Tahun 1893, ayat 6, yang menetapkan bahwa “bahasa pribumi yang dianggap paling bersih, seperti untuk sekolah-sekolah di Jawa Barat, harus bahasa Sunda Bandung”. Karena

diajarkan di sekolah dan menjadi bahasa pengantar secara keseluruhan, bahasa Sunda dialek Bandung disebut juga *basa sakola*, yang kemudian berubah menjadi *basa lulugu* 'basa standar' atau *basa Sunda lulugu*.

Bahasa Sunda di Jawa Barat berkedudukan sebagai bahasa daerah. Hal ini sejalan dengan UUD 1945, Bab IV, Penjelasan Pasal 36, yang menyebutkan bahwa "Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya, bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya), bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup."

Dalam Seminar Politik Bahasa Nasional pada tahun 1975 di Jakarta dijelaskan bahwa di Indonesia berkembang tiga jenis bahasa, yakni bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa asing. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa Nasional. Di dalam hubungannya dengan kedudukan bahasa Indonesia, bahasa-bahasa seperti Sunda, Jawa, Bali, Madura, Bugis, Makasar, dan Batak, yang terdapat di Wilayah Republik Indonesia, berkedudukan sebagai bahasa daerah.

Seperti bahasa daerah lainnya di Indonesia, bahasa Sunda di Jawa Barat memiliki fungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, (4) pendukung bahasa nasional, (5) bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan (6) alat pengembangan serta pendukung kebudayaan daerah (Halim, 1980).

2.2.2 Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Daerah

Di Jawa Barat bahasa daerah terus dipelihara, dibina, dan dikembangkan oleh pribadi, kelompok, maupun pemerintah. Pemeliharaan, pembinaan, dan pengembangan bahasa daerah (Sunda) telah dilakukan sejak zaman kolonial Belanda sampai sekarang ini. Identifikasi dan pengkajian bahasa Sunda dimulai sejak tahun 1800-an, yang dipelopori oleh peneliti asing, antara lain: Rigg (1862), Geerdink (1875), Oosting (1884), Meijer (1890), Coolsma (1904), Pleyte (1912), Kats & Soeridiradja (1927), van Syock (1959), dan Robins (1959), kemudian diikuti oleh peneliti pribumi seperti Ardiwinata (1916), Adiwidjaja (1951), Satjadibrata (1944), Nataprawaira (1952), Wirakusumah & Djajawiguna (1957), Noorduyn (1962), Salmun (1970), Rusyana dkk. (1975), Sutawijaya dkk. (1976), Ayatrohaedi (1978), Ekadjati (1979), Hermansoemantri (1979), Prawirumantri dkk. (1979), Prawiraatmaja dkk. (1979), dan Suriamiharja dkk. (1980).

Di samping pribadi-pribadi, pemeliharaan bahasa daerah dilakukan pula oleh instansi atau yayasan, antara lain, Balai Pengembangan Bahasa Daerah (BPBD) Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, Lembaga Basa jeung Sastra Sunda (LBSS), Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI, Jurusan Sastra Sunda UNPAD, Yayasan Pasundan, dan Yayasan Atikan Sunda.

Pembinaan dan pengembangan bahasa daerah dapat dilakukan dengan aneka cara, antara lain, melalui pengajaran secara formal di sekolah-sekolah. Cara seperti ini termasuk yang paling efektif dan efisien karena kegiatannya dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi, sehingga hasilnya dapat terukur. Pengajaran bahasa Sunda di Jawa Barat dilaksanakan sejak SD/MI

sampai SMP/M.Ts., bahkan beberapa SMA/SMK swasta (Pasundan dan Yayasan Atikan Sunda), serta beberapa perguruan tinggi seperti di UPI, UNPAD, UNPAS, UNSIL, dan UNSUR.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975 di Jakarta disimpulkan bahwa:

“Pengembangan pengajaran bahasa daerah bertujuan meningkatkan mutu pengajaran bahasa daerah sedemikian rupa sehingga penuturnya memiliki (1) keterampilan berbahasa daerah, (2) pengetahuan yang baik mengenai bahasa daerah, dan (3) sikap positif terhadap bahasa daerah dan sastranya. Pengajaran bahasa daerah adalah sarana yang ikut: (a) menunjang pembinaan unsur kebudayaan nasional, (b) mengarahkan perkembangan bahasa daerah, dan (c) membakukan ragam bahasa daerah” (Halim, 1980).

Pendidikan bahasa daerah (Sunda) di sekolah-sekolah di Jawa Barat masih menyimpan banyak permasalahan. Sudaryat (2001:92) dalam Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS) I di Bandung mengemukakan bahwa:

“Pengajaran bahasa daerah (Sunda) di sekolah berfungsi penting dalam kehidupan sosial budaya Sunda karena termasuk cara yang efektif dalam memelihara, membina, dan mengembangkan bahasa, sastra, dan social budaya Sunda. Penghilangan pengajaran bahasa Sunda di sekolah akan menimbulkan kerugian. Dalam pelaksanaan pengajaran bahasa Sunda sekarang ditemukan adanya masalah, antara lain, (1) kurangnya guru yang professional, (2) kurangnya minat dan sikap pelajar, (3) ketidakberhasilan proses belajar mengajar, (4) isi kurikulum dan bahan ajar, dan (5) lingkungan pengajaran.”

Masalah pengajaran bahasa daerah tersebut berdampak pula pada masalah pendidikan nasional, yakni “berlangsungnya pendidikan yang kurang bermakna bagi pengembangan pribadi dan watak peserta didik, yang berakibat hilangnya kepri-badian dan kesadaran akan makna hakiki kehidupan” (GBHN, 1999).

2.3 Sastra Daerah

2.3.1 Batasan Sastra Daerah

Sastra adalah hasil rekacipta manusia yang mengandung unsur keindahan (estetis) yang diungkapkan melalui medium bahasa (Rusyana, 1982:3). Sastra daerah adalah sastra yang diungkapkan dalam bahasa daerah baik lisan maupun tulisan (Perda No. 3/2005, Pasal 1 Ayat 9).

2.3.2 Pembelajaran Sastra Daerah

Pembelajaran sastra daerah di sekolah-sekolah di Indonesia biasanya dimasukkan ke dalam pembelajaran bahasa dan sastra daerah. Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan sintelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya.

Tujuan pembelajaran sastra daerah adalah agar siswa (1) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan; dan (2) Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Menurut Rusyana (1982:6-7), pengajaran sastra di sekolah-sekolah bertujuan agar siswa memperoleh pengalaman sastra dan pengetahuan sastra. *Pertama*, tujuan untuk memperoleh pengalaman sastra, yang dibagi

menjadi dua bagian, yaitu memperoleh pengalaman dan mengapresiasi sastra dan memperoleh pengalaman dalam berekspresi sastra. Dalam pengajaran apresiasi sastra, guru harus memberikan kesempatan agar murid memperkembangkan apresiasinya sendiri. Kegiatan ekspresi sastra dimaksudkan untuk mengembangkan daya mencipta pada anak.

Kedua, tujuan untuk memperoleh pengetahuan sastra, yakni untuk memperoleh pengetahuan tentang sejarah sastra, teori sastra, dan kritik sastra. Tujuan untuk beroleh pengetahuan sastra itu berjalanan erat dengan tujuan beroleh pengalaman sastra, sehingga murid beroleh wawasan tentang sastra, misalnya pengetahuan lagu sastra, irama sastra, dan bentuk sastra, diberikan setelah murid beroleh pengalaman membaca hasil sastra. Dalam waktu membaca itu mereka mengalami melagukan sastra, merasakan dan menyatakan irama, dan melihat bentuk sastra. Pengalaman yang mereka miliki itu kemudian diperjelas dengan pengetahuan tentang hal itu.

Ruang lingkup Mata Pelajaran Bahasa Indonesia mencakup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek (1) mendengarkan, (2) berbicara, (3) membaca, dan (4) menulis. Ruang lingkup bahan pembelajaran tersebut dituangkan dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD), yang berupa kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra daerah. Standar kompetensi ini merupakan dasar bagi peserta didik untuk memahami dan merespon situasi

lokal, regional, nasional dan global (Depdiknas, 2006:260-261). Bahan ajar sastra daerah mencakup (a) prosa, (b) puisi, dan (c) drama.

Dalam mencapai tujuan pembelajaran melalui pelaksanaan pengajaran di dalam kelas, terdapat berbagai cara atau metode pembelajaran sastra. Metode ini harus dipilih secara tepat sesuai dengan tujuan, bahan, keadaan siswa, dan suasana kelasnya. Rusyana (1982:17-24) menyebutkan tujuh metode pembelajaran sastra, antara lain, adalah:

- (a) siswa mendengarkan cerita,
- (b) siswa membaca,
- (c) siswa menonton pementasan drama,
- (d) siswa bertukar pengalaman bersastra,
- (e) siswa bercerita dan berdeklamasi,
- (f) siswa membaca nyaring karya sastra,
- (g) siswa mengarang, dan
- (h) siswa memainkan peranan.